

Adaptasi Kebijakan Pengelolaan Wisata untuk Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Pantai Dato

Muhammad Syahid Sirih^{1, @}, Muhammad Hasyim^{2, @}, Nasruddin^{3, @}, Amirul Ahsan Anwar^{4, @}

¹ Universitas hasanuddin, Makassar, Indonesia

² Universitas hasanuddin, Makassar, Indonesia

³ Universitas hasanuddin, Makassar, Indonesia

⁴ Universitas hasanuddin, Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:
Tourism, Policy,
AGIL

ABSTRACT

Tourism at Dato Beach, Majene Regency has the potential to be developed into a leading regional sector. However, tourism development needs to pay attention to sustainability in order to provide long-term benefits for society and the environment. This research aims to analyze the adaptation of tourism management policies at Dato Beach in realizing sustainable tourism using the AGIL framework. This qualitative research found that in general tourism management policies at Dato Beach are oriented towards the concept of sustainable tourism. However, at the technical implementation level there are still gaps with sustainable principles, especially regarding technical regulations and socialization. Policy adaptation is needed through strengthening regulations, cross-sector coordination, outreach and routine monitoring. Policy recommendations are prepared so that tourism development at Dato Beach can be optimal in providing economic, social and environmental preservation benefits. By adapting appropriate policies, it is hoped that Dato Beach tourism can grow sustainably.



This is an open access article under the CC BY-SA License

@ syahidm085@gmail.com

@ hasyimfrance@unhasac.id

@ nasruddin.1101@gmail.com

@ amirulhasan27@gmail.com

1. Pendahuluan

Kabupaten Majene yang terletak di bagian barat pulau Sulawesi memiliki segudang potensi pariwisata hal ini dibuktikan dari banyaknya pemandangan – pemandangan alam yang dapat memanjakan mata. Hal ini sering sekali terlontar dari mulut pengunjung – pengunjung yang baru pertama kali menginjakkan kaki ditanah mandar ini, terutama bagi para pelintas kabupaten Majene yang melukukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya. Para pelintas ini akan di sajikan pemandangan laut, pantai dan tebing di hampir sepanjang menyisir kabupaten Majene.

Salah satu pantai di kabupaten Majene yang sering menjadi tujuan utama para wisatawan adalah Pantai Dato, terletak hanya sekitar sepuluh menit dari pusat kota. Pantai ini adalah satu dari sekian banyak destinasi wisata pantai yang ada di Majene dan memiliki daya Tarik yang begitu besar. Pantai dengan bibir dipenuhi pasir putih, karang karang kecil pantai yang bersahabat di kaki, air laut yang begitu jernih dan dikelilingi oleh tebing - tebing di sekitran pantainya, hal ini tentu memiliki potensi besar untuk dikembangkan untuk menjadi wisata unggulan di Kabupaten Majene, namun sayangnya pengembangan pariwisata di pantai dato belum menapakkan sepenuhnya aspek pariwisata berkelanjutan. Banyaknya aktivitas pariwisata yang tidak terkendali dan upaya pembangunan oleh pemerintah yang cenderung tidak memperhatikan aspek lingkungan, hal ini tentunya menimbulkan dampak negatif contohnya seperti terumbu karang yang perlahan rusak, pencemaran lingkungan hingga kemungkinan terjadinya abrasi.

Berdasarkan data dari dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Majene pengunjung pantai dato pada tahun 2020 berjumlah 110,780 dan tahun 133,838 pada tahun 2021 (Dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.Majene :2022) berdasarkan data tersebut kunjungan wisatawan ke pantai dato kian bertambah. Namun, masih sangat banyak hal yang perlu diberikan interpersi kebijakan pariwisata aspek berkelanjutan. Contohnya seperti fasilitas pengelolaan sampah yang sangat minim sehingga berpotensi mengalami pencemaran lingkungan yang hal ini akan mengakibatkan daya Tarik wisatawan menurun, aktivitas pembangunan seperti gazebo yang dilakukan oleh dinas pariwisata juga dinilai masyarakat merusak terumbu karang disekitar pantai dato. Pembangunan fisik di wilayah pesisir seringkali mengancam keberadaan terumbu karang(Anton & Yudho Prasetya, n.d.).

Jika di lihat melalui aspek social budaya, setiap kunjungan wisata yang berjumlah besar akan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negative seperti komudikasi budaya hingga nilai – nilai luhur masyarakat mandar yang akan memudar. Interaksi antar wisatawan dan masyarakat local juga pasti akan beresiko menghadirkan dampak social seperti demonstrasi efek dan kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah setempat perlu memikirkan berbagai ancaman yang dapat terjadi dan harus melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan, hal ini harus dipikirkan lebih jauh untuk pembangunan pariwisata di pantai dato agar memenuhi aspek keberlanjutan. Keterlibatan masyarakat local penting untuk menjamin keberlanjutan pariwisata (Kurniawati, n.d.).

Dari hasil obeservasi secara objektif dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata di panati dato belum sepenuhnya berkelanjutan. Dibutuhkan sebuah kebijakan pengelolaan wisata yang mampu menyeimbangkan aspek ekonomi, social, dan lingkungan agar system pariwisata di pantai dato dapat berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud disini harus bersifat adaptive kepada prinsip – prinsip pariwisata berkelanjutan dan melibatkan stecholder terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis adaptasi dari kebijakan pengelolaan wisata di Pantai Dato untuk menjadikan pariwisata berkelanjutan melalui kajian dan analisis AGIL. Kerangka AGIL digunakan untuk menganalisis adaptasi kebijakan dari multi dimensi, yaitu yaitu adaptasi (A), pencapaian tujuan (G), integrasi (I), dan pelestarian nilai-nilai lokal (L).

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan pariwisata berkelanjutan yang adaptif terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola pariwisata di Pantai Dato agar memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pariwisata Pantai Dato dapat terus berkembang secara berkelanjutan.

Tulisan ini akan mengulas tinjauan pustaka tentang pariwisata berkelanjutan melalui teori AGIL, diikuti dengan metodologi penelitian, analisis data, dan penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Diharapkan tulisan ini dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis adaptasi kebijakan pengelolaan wisata di Pantai Dato. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan yang dipilih secara purposive, meliputi: pengelola pantai dato, masyarakat lokal, pelaku wisata, dan akademisi. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan pengelolaan wisata di Pantai Dato dan implementasinya, serta pandangan informan terkait pariwisata berkelanjutan.

Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat kondisi destinasi wisata Pantai Dato serta interaksi antara wisatawan, masyarakat, dan lingkungan. Telaah dokumen dilakukan terhadap dokumen formal terkait kebijakan pariwisata daerah.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka AGIL. Analisis dilakukan secara induktif terhadap data lapangan dan tidak ditentukan sebelumnya. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan hasil analisis data tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini di kelompokkan sesuai analisis AGIL, dapat dilihat dari table berikut :

Tabel I. Hasil analisis AGIL

<i>Adaptation</i>	<i>Goal Attainment</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan Perda No.13 Tahun 2013, tentang pariwisata berkelanjutan • Belum ada pendekatan yang komprehensif untuk mengendalikan jumlah wisatawan agar tidak melebihi daya dukung ekologis • Belum ada kelompok sadar wisata dari masyarakat lokal yang terlibat secara aktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kordinasi antar pengelola dan masyarakat masih sangat lemah • Adanya aktivitas pengelola yang tidak selaras.
<i>Integration</i>	<i>Latency</i>
Perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan forum komunikasi yang intensif antar OPD terkait untuk meningkatkan integrasi kebijakan dan sinergi program	kondisi lingkungan di Pantai Dato didominasi oleh hamparan pasir putih dan formasi terumbu karang di sekitarnya

Dari table analisis agil tersebut telah di rangku berbagai temuan hal ini di perjelas dalam pembahasan berikut :

Adaptasi Kebijakan Pengelolaan Wisata di Pantai Dato

Adaptation berarti adaptasi hal ini dimaksud sebagai sistem dalam hubungan masyarakat harus mampu memenuhi segala kebutuhan dasar serta sebagai suatu sistem yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Ini juga menggambarkan bagaimana suatu sistem dalam kehidupan sosial sangat tergantung pada fenomena tertentu yang terjadi di lingkungannya. Kebutuhan suatu sistem untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapinya dapat bersifat sosial atau asosial/material. Melalui adaptasi, sistem dapat mengamankan apa yang dibutuhkannya dari lingkungannya dan mendistribusikan sumber daya tersebut ke seluruh sistem.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Dato melalui Perda No.13 Tahun 2013. Kebijakan ini secara makro telah mengadaptasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, seperti pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pelibatan masyarakat lokal, dan pencegahan eksploitasi alam. Namun, pada tataran implementasi teknis di lapangan masih terdapat kesenjangan. Misalnya, belum ada pendekatan yang komprehensif untuk mengendalikan jumlah wisatawan agar tidak melebihi daya dukung ekologis Pantai Dato. Sejauh ini baru ada himbauan agar wisatawan tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, belum ada kelompok sadar wisata dari masyarakat lokal yang secara aktif terlibat dalam pengawasan kegiatan wisata di Pantai Dato.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan adaptasi kebijakan pengelolaan wisata dengan cara: 1) Membuat aturan teknis terkait kapasitas wisatawan maksimal per hari di Pantai Dato; 2) Membentuk kelompok peduli wisata dari masyarakat lokal; 3) Meningkatkan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan wisatawan; 4) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan wisata berkelanjutan.

Pencapaian Tujuan Bersama

Goal Attainment merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai suatu system dan bagaimana pencapaian suatu sistem tersebut. Sistem atau struktur sosial yang dimaksud harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Bagaimana kemampuan suatu kelompok untuk membangun sebuah visi bersama. Visi ini akan menjadi sebuah kesepakatan atau consensus yang dibentuk melalui interaksi sosial dalam mengarahkan perkembangan masyarakat. Goal attainment ini yang akan menjadi syarat fungsional menentukan tujuan dan memprioritaskan tujuan yang ada. Setiap tindakan individu selalu berpedoman pada pencapaian tujuan. Namun, perhatian utama tidak terfokus pada tujuan individu individu, tetapi pada tujuan bersama dari elemen-elemen yang berpartisipasi dalam system sosial.

Dari hasil penelitian ditemukan bentuk kordinasi yang lemah antara pengelola wisata, masyarakat setempat, dan pemilik UMKM sekitar pantai dato. Kondisi ini memungkinkan potensi tidak efektif dalam mencapai tujuan dari pariwisata berkelanjutan karena setiap pemangku kepentingan pengelola pariwisata pantai dato seolah memiliki tujuan masing – masing untuk tata Kelola yang belum selaras. Misalnya, beberapa program pembangunan dari pengelola wisata lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti pembanguan gazebo yang menurut masyarkat setempat hal tersebut merusak beberapa batu karang disekitar pantai.

Perlunya dibentuk sebuah kordinasi pariwisata tingkat kabupaten yang melibatkan semua *stecholder*, seperti pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat local, pelaku industry, Lembaga swadaya masyrakat hingga akademisi. Forum ini yang akan membuat komunikasi yang efektif untuk menyelaraskan program – program yang akan dilaksanakan di pantai dato dan mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan triple bottom line pariwisata berkelanjutan di Pantai Dato.

Integrasi Kebijakan

Integration yang merupakan sebuah sistem atau dapat diartikan sebagai struktur sosial yang mampu mengatur antara hubungan yang komponen dan mampu mengelola antar ketiga hubungan fungsi lainnya. Ini menciptakan hubungan yang lebih kuat dalam mengatur pola perilaku masyarakat. Premis dari integrasi fungsional adalah syarat bahwa sistem dapat berkoordinasi dan menciptakan kesesuaian antar bagian atau anggota sistem. Fungsionalitas yang terintegrasi dapat terwujud jika bagian-bagian atau anggota-anggota dari suatu sistem memainkan peran sesuai dengan fungsinya secara keseluruhan. Agar suatu sistem sosial dapat berfungsi secara efektif sebagai suatu unit, setidaknya harus ada tingkat solidaritas tertentu di antara bagian-bagian atau individu-individunya. Masalah integrasi mengacu pada kebutuhan untuk memastikan bahwa hubungan emosional cukup untuk menciptakan solidaritas dan keinginan untuk bekerja sama dikembangkan dan dipertahankan. Hubungan emosional ini tidak boleh bergantung pada manfaat yang diterima atau kontribusi yang diberikan untuk mencapai tujuan individu atau kolektif. Jika tidak, solidaritas sosial dan kemauan untuk bekerja sama akan jauh lebih rapuh, karena hanya didasarkan pada kepentingan pribadi.

Integrasi kepentingan dan sinergi pemangku kepentingan pariwisata di Pantai Dato masih lemah (Analisis I). Hal ini terlihat dari masih terjadinya tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang menghambat keterpaduan dalam mencapai tujuan bersama. Misalnya, Dinas Pariwisata mengeluarkan kebijakan yang kurang berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait amdal suatu kegiatan wisata. Akibatnya, ada kegiatan wisata yang berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan forum komunikasi yang intensif antar OPD terkait untuk meningkatkan integrasi kebijakan dan sinergi program.

Diperlukan pula kepemimpinan kolaboratif dari Bupati untuk memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan integrasi kebijakan antar OPD terkait pariwisata berkelanjutan di Pantai Dato. Misalnya, dengan memimpin rapat koordinasi berkala yang dihadiri oleh Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, Badan Perencanaan, dan SKPD terkait lainnya. Rapat koordinasi ini dapat menjadi media untuk menyelaraskan visi dan rencana kerja setiap OPD agar selaras dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Pantai Dato dapat lebih terintegrasi dan optimal.

Pelestarian Lingkungan

Latency mempunyai fungsi yang cukup penting dalam mempertahankan sebuah fakta sosial atau otoritas, personalitas atau fungsi tipe ideal dan karakter sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Disini, nilai budaya yang akan memberikan identitas atau kepribadian masyarakat akan memberikan template bagaimana institusi sosial lainnya bekerja dan memberikan warna dan tekstur atas proses yang berputar dalam sistem sosial tersebut. Dalam hal ini, seseorang dapat menemukan motivasi atau makna yang mewarnai tindakan sosial merek. Tidak cukup bagi sebuah sistem sosial jika hanya mempunyai adaptation, goal attainment, dan integration. Namun diperlukan sebuah proses sosialisasi lintas generasi yang akan menjadi sebuah kebudayaan dan diikuti oleh banyak orang dalam jangka waktu yang lebih lama inilah yang disebut *latency*

Berdasarkan observasi lapangan, diketahui bahwa kondisi lingkungan di Pantai Dato didominasi oleh hamparan pasir putih dan formasi terumbu karang di sekitarnya (Analisis L). Sayangnya, terumbu karang di beberapa spot penyelaman dinilai kurang terpelihara dengan baik. Misalnya, terdapat sampah plastik yang tersangkut dan karang yang patah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pelestarian terumbu karang di Pantai Dato melalui pembersihan secara berkala, sosialisasi menjaga kebersihan kepada pengunjung, pemasangan rambu peringatan, dan pelatihan penyelaman ramah lingkungan.

Dengan demikian, keindahan terumbu karang di Pantai Dato dapat dilestarikan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Mohon berikan masukan jika masih terdapat kekurangan. Saya sangat terbuka untuk terus belajar memahami kondisi di Pantai Dato.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kebijakan pengelolaan wisata di Pantai Dato, dapat disimpulkan bahwa secara umum telah berorientasi pada pariwisata berkelanjutan. Namun, pada implementasi teknis di lapangan masih terdapat kesenjangan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Hal ini menunjukkan perlu adanya adaptasi dan penguatan kebijakan agar sesuai dengan praktik di lapangan.

Masalah lain yang perlu mendapat perhatian adalah lemahnya koordinasi dan integrasi antar pemangku kepentingan pariwisata di Pantai Dato. Diperlukan forum koordinasi dan penguatan kepemimpinan kolaboratif untuk meningkatkan sinergi di antara mereka. Dengan demikian, pengembangan pariwisata di Pantai Dato dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Selain itu, upaya pelestarian lingkungan perlu terus diperkuat agar keaslian dan daya tarik Pantai Dato tetap terjaga. Hal ini sangat penting untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di masa mendatang. Pelestarian lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai program seperti penghijauan, pengelolaan sampah, dan edukasi wisatawan.

Dengan melakukan berbagai perbaikan tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, diharapkan pengembangan pariwisata di Pantai Dato dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan aspek sosial dan lingkungan. Pariwisata berkelanjutan di Pantai Dato dapat menjadi contoh pengelolaan wisata pantai terbaik di Indonesia.

Daftar Pustaka :

Article :

- Atjo, A. A., Fitriah, R., & Nur, R. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Terumbu Karang Untuk Kesesuaian Lokasi Wisata Selam, Pantai Dato Kabupaten Majene. *SIGANUS: Journal Of Fisheries And Marine Science*, 1(1), 1-9.
- Awwaluddin, A. M., & Sadewo, F. S. (2021). Analisa Kebijakan Pendidikan Kependudukan: Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Dalam Perspektif Teori Agil Talcott Parssons. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora*, 5(1), 181-191.
- Fitri, W. Y., Wibowo, A. W., & Ariyanto, D. B. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 105-112.
- Herawati, A. (2023). Perubahan Sosial Masyarakat Di Masa New Normal (Analisis Menggunakan Perspektif Sosiologi Talcott Parsons). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 285-291.
- Kusumawidjaya, E., Adawiyah, R., Abduh, M. S., & Djati, S. P. (2022). KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PRAKTIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERHADAP PENGEMBANGAN DESA WISATA BERKELANJUTAN DI JAWA TIMUR: SEBUAH MODEL MEDIASI. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 9(3), 1440-1456.
- Musaddad, AA, Rahayu, OY, Pratama, E., Supraptiningsih, S., & Wahyuni, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, 2 (1).

- Qodriyatun, SN (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah Sosial*, 9 (2), 240-259.
- Rusydiyah, E. F., & Rohman, F. (2020). Local Culture-Based Education: An Analysis Of Talcott Parsons' Philosophy. *International Journal Of Innovation, Creativity And Change*, 12(3), 592-607.

Book :

- Aulia, S. S. Perencanaan Lanskap Pesisir Sebagai Kawasan Ekowisata Di Pantai Dato Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.
- DI PANTAI, D. M., & FANSURI, M. F. PENGARUH VIRAL MARKETING MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN.
- Putera, F. H. A. (2013). Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Wisata Pantai Di Pantai Pasir Putih Bira, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Doctoral Dissertation).
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Sulistyadi, Y., Eddyono, F., & Entas, D. (2019). Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perspektif Wisata Budaya Di Taman Hutan Raya Banten . *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Wahyu, W., Azikin, R., & Nasrulhaq, N. (2020). Partisipasi Komunitas Lokal Dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Dato Di Kabupaten Majene. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 341-354.
- Wardiana, D. A., Arifianti, R., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Di Kawasan Wisata Situ Cileunca Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 189-193.